



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
DAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG
MAGANG, STUDI INDEPENDEN DAN RISET



NOMOR : 164/III.1/F/2022

NOMOR : PN.01.00/22-PKS/VIII/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas bulan Agustus , tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-08-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RENI MULYANI : Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor. 1350/KEP/1.0/E.2020 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi berkedudukan di Jln. R. Syamsudin, SH No.50 Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. TOHA WILDAN ATHOILAH : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 820/Kep.1141-BKPSDM/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Setingkat Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sukabumi Nomor PN.01.00/5447-KSM/2022 berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu 43164 Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam PKS ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Sains dan Teknologi, bagian administratif dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang membawahi Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Sipil dan Program Studi Kimia;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam bentuk Magang, Studi Independen dan Riset yang dilaksanakan oleh Program Studi Teknik Informatika **PIHAK KESATU** perlu melakukan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**;
4. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi tentang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 070/06-Kesber/I/2020 dan Nomor 177/I.O/F/2020 tertanggal 29 Januari 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Magang, Studi Independen dan Riset (selanjutnya disebut “Perjanjian”) berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Program Magang, Studi Independen dan Riset bagi mahasiswa dan dosen **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah menunjang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al Islam Kemuhammadiyah dalam rangka implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM).

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerjasama adalah Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Magang, Studi Independen dan Riset.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi Kegiatan Magang dan Penelitian bagi mahasiswa dan dosen Program Studi Teknik Informatika dan Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi berupa:

- a. Pemberian materi dalam pelatihan dan atau sosialisasi bagi masyarakat berkaitan dengan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat Magang, Studi Independen dan Riset dilaksanakan berdasarkan jadwal program dan kegiatan yang disusun dan ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Struktur mata kuliah dalam kegiatan Magang, Studi Independen dan Riset yang akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** adalah :

Program Studi Teknik Informatika

No.	Bentuk Kegiatan	Estimasi Waktu	SKS	Kesetaraan Mata Kuliah dan sks			
				Matakuliah	Semester	SKS	Ket
1	Penerapan struktur perangkat lunak di industri	1 semester	3	Rekayasa Perangkat Lunak 2	5	3	-
2	Penerapan framework program berbasis industri	1 semester	3	Pemrograman Berorientasi Objek	3	3	-
3	Kemandirian dalam solusi kasus di industri	1 semester	3	Capacity Building	8	3	-
4	Kinerja Magang dan pelaporan	1 semester	3	Kerja Praktik	6	3	-
5	Penerapan dan penyesuaian infrastruktur jaringan di industri	1 semester	3	Jaringan Komputer	4	3	-
JUMLAH			15	-	-	15	-

Riset Dosen dan Mahasiswa di Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi

No	Penelitian	Jenis Riset
1	Mahasiswa	Tugas Akhir, Praktek Kerja Lapangan, dan PKM Kemendikbudristek
2	Dosen	<ul style="list-style-type: none">- Kemendikbudristek: BRIN, Kedaireka/Matching Fund.- Institusi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
3	Dosen	Penelitian Mandiri

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berhak :

- Mengirimkan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan Magang, Studi Independen dan Riset sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati;
- Melaksanakan riset dengan judul dan tema yang telah disepakati.
- Mendapatkan fasilitasi Magang, Studi Independen dan Riset diwilayah kerja **PIHAK KEDUA**;
- Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan magang/ praktik kerja;

(2) **PIHAK KEDUA** berhak :

- Menerima dosen dan mahasiswa peserta Magang, Studi Independen dan Riset dengan jadwal yang sudah disepakati;
- Menerima riset dan publikasi bersama dengan judul dan tema yang disepakati.
- Mendapatkan manfaat dari pelaksanaan Magang, Studi Independen dan Riset kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- Memberikan teguran kepada dosen dan mahasiswa Magang, Studi Independen dan Riset yang melanggar aturan yang disyaratkan.

(3) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban :

- Memberikan jaminan bahwa dosen dan mahasiswa peserta Magang, Studi Independen dan Riset akan mentaati ketentuan yang disyaratkan **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan;
- Memastikan dosen dan mahasiswa Magang, Studi Independen dan Riset memiliki Asuransi Kesehatan;
- Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh akibat perjanjian; dan

- d. Menyerahkan laporan hasil kegiatan Magang, Studi Independen dan Riset kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban :

- a. Memberikan izin kepada **PIHAK KESATU** untuk mengirimkan dosen dan mahasiswa Magang, Studi Independen dan Riset sesuai jadwal yang sudah disepakati;
- b. Memberikan fasilitasi kegiatan Magang, Studi Independen dan Riset di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**; dan
- c. Memberikan bimbingan yang diperlukan dalam pelaksanaan Magang, Studi Independen dan Riset.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan evaluasi secara berkala setiap tahun, untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi permasalahan dan menetapkan solusi.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Perjanjian Kerja Sama ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** akan memperlakukan semua data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada **PIHAK** ketiga dan/atau **PIHAK** lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

- (3) PIHAK yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh PIHAK yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan Perjanjian Kerja Sama, dan oleh karenanya PIHAK yang menerima informasi setuju dan berjanji bahwa PIHAK yang menerima informasi tidak akan mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja sama dengan PIHAK lain manapun.
- (4) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku untuk waktu yang tidak terbatas, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri.
- (5) Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan atau dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang timbul di luar kekuasaan **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara atau perubahan kebijakan pemerintah, sehingga salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana maksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya;
- (3) **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang

dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

Pasal 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini dengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian ini berakhir karena :
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. pembatalan secara sepihak oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri perjanjian; dan
 - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
Jl. R. Syamsudin, SH No. 50 Kota Sukabumi
Telepon : (0266) 218342
Email : saintek@ummi.ac.id

PIHAK KEDUA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu 43164
TELEPON : (0266) 434011 - 434012
EMAIL : bpkad@sukabumi.go.id

Pasal 13

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Apabila dalam perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup Perjanjian ini, maka akan dilakukan perubahan atas Perjanjian ini berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu risalah kesepakatan untuk selanjutnya dibuatkan perubahan Perjanjian, dimana perubahan termaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Segala sesuatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan **PARA PIHAK** atau karena **PARA PIHAK** meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Sukabumi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

TOHA WILDAN ATHOILAH

PIHAK KESATU



RENI MULYANI